

**EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT-
GENERATION (SIKS-NG) DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN
SOSIAL**

(Studi pada Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik

Oleh

THEREZZA DEERLLEN PUTRI MAHARANI SUJANTO

NPM 22101091066



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Therezza Deerllen Putri Maharani Sujianto, 22101091066, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial (Studi pada Kantor Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso)", Dosen Pembimbing1 : Dr.Afifuddin,S.Ag.,M.Si, Dosen Pembimbing 2 : Langgeng Rachmatullah Putra. S.AP., M.AP

SIKS-NG adalah aplikasi digital untuk mengelola bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Tawangargo. Aplikasi ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan akses masyarakat terhadap informasi bantuan, namun menghadapi tantangan ketidakstabilan server, kurangnya pelatihan operator, dan kesenjangan digital antar generasi. Penelitian menggunakan teori George C. Edwards III yang menganalisis keberhasilan melalui empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, di mana penelitian berupa narasi, data dan gambaran terkait permasalahan yang dibahas, selanjutnya ditarik menjadi sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan. Tujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan melalui sistem SIKS-NG dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi PKH melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo mencapai hasil beragam dengan kategori cukup berhasil. Program meningkatkan efisiensi pelayanan melalui komunikasi digital lancar, infrastruktur memadai, sikap petugas positif, dan struktur organisasi jelas. Namun menghadapi tantangan ketidakstabilan server, kurang pelatihan operator, kesenjangan digital generasi, dan koordinasi lintas sektor yang kompleks, sehingga memerlukan perbaikan teknis dan peningkatan kapasitas.

Dapat disimpulkan Implementasi PKH melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo cukup berhasil memvalidasi teori Edwards III bahwa keempat faktor harus bekerja sinergis. Program memberikan kemudahan akses bantuan melalui digitalisasi namun memerlukan perbaikan stabilitas sistem, pelatihan operator, dan pendekatan inklusif. Keberhasilan implementasi kebijakan digital desa bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan adaptasi semua pihak.

Kata Kunci: SIKS-NG, PKH, Digitalisasi, Bantuan Sosial, Implementasi Kebijakan

SUMMARY

Therezza Deerllen Putri Maharani Sujianto, 22101091066, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025, "Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) on the Application of the Next-Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in the Distribution of Social Assistance (Study at the Tawangargo Village Office, Karangploso District)", Supervisor 1: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Supervisor 2: Langgeng Rachmatullah Putra. S.AP., M.AP

SIKS-NG is a digital application for managing the Family Hope Program social assistance program in Tawangargo Village. This application improves data management efficiency and public access to aid information, but faces challenges such as server instability, lack of operator training, and the intergenerational digital divide. The study uses George C. Edwards III's theory, which analyzes success through four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employed qualitative methods with descriptive research, including observation, interviews, and documentation. The research consisted of narratives, data, and descriptions related to the issues discussed, which were then drawn into conclusions as answers to the problems. The objective was to evaluate the effectiveness of the Family Hope Program implementation through the SIKS-NG system in improving the quality of social assistance distribution to the community.

The results show that the implementation of the Family Hope Program through SIKS-NG in Tawangargo Village achieved mixed results, with some being categorized as moderately successful. The program improved service efficiency through smooth digital communication, adequate infrastructure, positive staff attitudes, and a clear organizational structure. However, it faces challenges such as server instability, lack of operator training, the intergenerational digital divide, and complex cross-sectoral coordination, requiring technical improvements and capacity building.

In conclusion, the implementation of PKH through SIKS-NG in Tawangargo Village has been quite successful, validating Edwards III's theory that all four factors must work synergistically. The program facilitates access to assistance through digitalization, but requires improvements in system stability, operator training, and an inclusive approach. The successful implementation of village digital policies depends on the readiness of the technological infrastructure and the adaptability of all parties.

Keywords: *SIKS-NG, PKH, Digitalization, Social Assistance, Policy Implementation*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik di Indonesia merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks negara yang beragam seperti Indonesia, kebijakan publik harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, serta mempertimbangkan kondisi lokal yang unik (Nugroho, 2014). Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan publik di Indonesia sering kali melibatkan dialog dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan publik di Indonesia adalah kompleksitas dan dinamika yang dihadapi dalam implementasinya. Menurut Wahab (2012), implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan dan memantau kebijakan tersebut di lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui reformasi birokrasi dan penerapan teknologi informasi. Digitalisasi dalam pemerintahan, seperti yang

terlihat dalam penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS - NG), merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan integrasi data penerima bantuan sosial. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga program-program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran (Kementerian Sosial RI, 2022).

Kebijakan publik di Indonesia juga harus memperhatikan aspek partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sangat penting untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Menurut Sari (2022), keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik dapat memberikan masukan yang berharga dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan.

Kebijakan publik di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara

Di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,75 juta orang atau sekitar 9,36% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan di Indonesia tidak hanya diukur dari aspek pendapatan, tetapi juga

mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya (BPS,2024)

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Wilayah pedesaan sering kali mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut lebih rentan terhadap kemiskinan (Raharjo et al., 2023). Menurut Kompas (2023),masih banyak daerah di Indonesia yang tertinggal dalam hal pembangunan, sehingga masyarakatnya sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Indonesia hingga saat ini. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berdampak pada akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh (Universitas Airlangga, 2025). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang menyebabkan generasi berikutnya sulit keluar dari jeratan kemiskinan karena terbatasnya akses pada fasilitas pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan peluang peningkatan ekonomi (Repository UGM, 2019).

Kemiskinan di Indonesia muncul dan bertahan karena berbagai faktor struktural dan kontekstual. Faktor historis berupa ketimpangan pembangunan sejak masa kolonial telah menciptakan kesenjangan antardaerah yang signifikan.

Urbanisasi tidak terencana mengakibatkan konsentrasi penduduk miskin di perkotaan tanpa keterampilan memadai. Keterbatasan akses terhadap modal, lahan, dan pasar produktif juga menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan menghalangi peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dari kelompok miskin (Suryahadi et al., 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer). Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dengan tujuan utama meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Hingga tahun 2024, PKH telah menjangkau jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dengan berbagai komponen bantuan yang disesuaikan berdasarkan komposisi keluarga.

PKH memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan persyaratan tertentu seperti memeriksakan kehamilan secara rutin, memastikan anak-anak bersekolah, dan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga, dengan penyaluran bantuan dilakukan empat kali dalam setahun (Jakarta.go.id, 2024). Model ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga mendorong investasi jangka panjang pada sumber daya manusia melalui perbaikan status pendidikan dan kesehatan.

Evaluasi dampak PKH menunjukkan hasil positif yang signifikan. Berdasarkan penelitian Repository UGM menggunakan data IFLS 5, PKH terbukti meningkatkan total pengeluaran pendidikan bagi keluarga sebesar Rp1.031.963,53 per tahun, serta meningkatkan total biaya transportasi sebesar Rp603.085,86, yang mengindikasikan adanya peningkatan aksesibilitas keluarga miskin terhadap layanan pendidikan (Repository UGM, 2021).

Evaluasi terhadap PKH menunjukkan dampak positif pada berbagai dimensi kesejahteraan. Studi evaluasi dampak PKH yang didukung Bank Dunia menunjukkan program ini efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak dan mengurangi pekerja anak melalui mekanisme conditional cash transfer (World Bank, 2011). Di sisi lain, tantangan implementasi masih ditemui seperti ketepatan sasaran, kapasitas pendamping yang terbatas, dan infrastruktur pendukung yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan juga masih memerlukan penguatan untuk memastikan efektivitas program dalam mendukung peluang ekonomi keluarga penerima manfaat (SMERU Research Institute, 2019).

Meskipun menunjukkan hasil positif, efektivitas jangka panjang PKH dalam mengentaskan kemiskinan struktural masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif. Konsep graduasi mandiri PKH menekankan pentingnya kemandirian KPM agar tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah (DRI IPB, 2019). Program-program peningkatan kapasitas, pembukaan

akses permodalan, dan perluasan peluang ekonomi produktif perlu diperkuat sebagai strategi exit bagi keluarga penerima PKH.

Dalam upaya mengatasi permasalahan keakuratan data penerima bantuan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG merupakan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perencanaan program kesejahteraan sosial melalui pengelolaan data kemiskinan yang lebih akurat dan terintegrasi. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, SIKS-NG menjadi alat utama dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia.



Gambar 1.1 Aplikasi SIKS-NG

SIKS-NG dirancang sebagai aplikasi untuk menginput dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan dengan fokus pada keakuratan dan ketepatan (Aptika Ogan Ilir, 2024). Melalui SIKS-NG, pemerintah daerah dapat mengelola data masing-masing secara online, transparan, murah, mudah, dan cepat

berdasarkan Permensos Nomor 28/2017. Perbaikan data dari lapangan dikelola melalui SIKS-NG dan dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan sosial (Menpan, 2024).

Sistem ini mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisi data induk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Desa Piyaman, 2024). SIKS-NG juga memiliki periode usulan dan verifikasi validasi (verval) DTKS yang dilakukan setiap bulan dengan tahapan usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dibuka mulai tanggal 1-11 setiap bulan (Desa Piyaman, 2024). Sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan data yang sebelumnya sering terjadi, seperti data yang tidak valid, tidak terintegrasi, dan sulit diakses. Implementasi SIKS-NG menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Implementasi SIKS-NG di Indonesia mulai dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018 dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Menurut Irawan (2021), SIKS-NG menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan sistem pendataan konvensional, antara lain kemampuan verifikasi data secara realtime, integrasi data antar lembaga pemerintah, serta fitur pemutakhiran data yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, SIKS-NG melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat pusat hingga desa, sehingga diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Namun demikian, implementasi SIKS-NG di lapangan tidak selalu berjalan mulus dan masih ditemukan berbagai kendala. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Rohman (2020), beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIKS-NG antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah pedesaan, kurangnya pemahaman operator terhadap penggunaan sistem, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat tujuan utama SIKS- NG dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.

Desa Tawangargo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan karakteristik wilayah pegunungan dan pertanian sebagai sektor ekonomi utama. Dengan jumlah penduduk sekitar 7.853 jiwa yang tersebar di 5 dusun, Desa Tawangargo menghadapi tantangan dalam pengelolaan data kemiskinan yang akurat untuk mendukung implementasi berbagai program bantuan sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-NextGeneration (SIKS-NG) telah menjadi instrumen penting dalam upaya Pemerintah Desa Tawangargo memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur dan terintegrasi.

Implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo dimulai pada tahun 2019 sebagai bagian dari program percontohan penerapan SIKS-NG berbasis desa di Kabupaten Malang. Berdasarkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tawangargo (2021), hingga akhir tahun 2020, sistem ini telah berhasil mengintegrasikan data dari 1.873 rumah tangga atau sekitar 92,7% dari total rumah tangga di desa tersebut. Penerapan awal SIKS-NG di Desa Tawangargo didukung

oleh Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pendataan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kemiskinan melalui platform SIKS-NG.

Salah satu inovasi dalam implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo adalah pengembangan "Sistem Pemutakhiran Data Berbasis Kejadian" sejak tahun 2020. Sistem ini menerapkan mekanisme pencatatan perubahan status sosial ekonomi rumah tangga berdasarkan kejadian-kejadian penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, perubahan pekerjaan, dan bencana alam. Setiap kejadian tersebut langsung dicatat oleh KPMD dan diinput ke dalam sistem SIKS-NG melalui aplikasi mobile yang dikembangkan bekerja sama dengan tim dari Universitas Brawijaya. Menurut penelitian Hidayat et al. (2022), pendekatan ini berhasil meningkatkan frekuensi pemutakhiran data dari semula dua kali setahun menjadi berbasis real-time, sehingga dinamika kemiskinan dapat terpantau secara lebih akurat. Berdasarkan Portal Satu Data Indonesia (2022), Indeks Desa Membangun digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memastikan akurasi dalam perencanaan program pembangunan desa.

Tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa masih ditemui dalam beberapa aspek. Berdasarkan kondisi umum implementasi sistem digital di desa, kendala utama meliputi infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal. Salah satu

tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur digital di desa-desa, meskipun penetrasi internet di Indonesia mengalami peningkatan, masih banyak desa yang belum mendapatkan akses internet stabil (Masterplandes,2022).

Selain masalah infrastruktur, kurangnya pelatihan SDM menjadi tantangan utama, di mana tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi baru, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah terpencil yang masih memiliki koneksi internet yang buruk (DigitalDesa.id,2024). Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa jangkauan jaringan internet di desa masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil, akibatnya banyak warga kesulitan mengakses layanan internet dengan kecepatan dan kualitas yang memadai.

Dalam konteks SIKS-NG khususnya, untuk meningkatkan kompetensi petugas pengelola DTKS, Kementerian Sosial secara rutin menyelenggarakan Pelatihan Teknis SIKS-NG agar para petugas lebih terampil dalam penggunaan aplikasi saat bertugas di wilayah masing-masing (Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kapasitas teknis operator masih menjadi fokus perhatian dalam implementasi sistem ini.

SIKS-NG merupakan aplikasi nasional yang digunakan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan operator di tingkat desa.

Implementasi PKH yang efektif sangat bergantung pada keakuratan data penerima bantuan. Tantangan dalam penargetan (targeting) penerima bantuan masih menjadi isu utama dalam implementasi PKH di Indonesia. PKH menargetkan rumah tangga dengan konsumsi per kapita 80% di bawah garis kemiskinan, yang berarti mengeksklusi rumah tangga dengan konsumsi per kapita yang masih di bawah garis kemiskinan, tetapi hanya di bawahnya maksimal 20% (Bimardhika, E.2023).

Kesalahan inklusi (inclusion error) dan kesalahan eksklusi (exclusion error) sering terjadi dalam program bantuan sosial, di mana rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan justru mendapatkannya, sementara rumah tangga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan (Sparrow, R., Suryahadi, A.,2013). Hal ini menunjukkan pentingnya akurasi data dalam sistem informasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Digitalisasi transfer bantuan sosial melalui PKH dimulai oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan mencapai inklusi keuangan berkelanjutan (MicroSave,2024). Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas data penerima yang akurat dan sistem informasi yang dapat diandalkan.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akurasi data penerima bantuan. Permasalahan data dalam program bantuan sosial telah menjadi isu nasional yang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, berikut penjelasannya :

1. Permasalahan utama yang sering terjadi dalam implementasi PKH mencakup ketidakakuratan data penerima bantuan, keterlambatan pemutakhiran data, serta kesulitan dalam verifikasi persyaratan. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu (Nadilla,2022). Kondisi ini mengakibatkan beberapa keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan PKH justru tidak terdaftar dalam database PKH, sementara beberapa keluarga yang kondisi ekonominya sudah meningkat masih menerima bantuan. Sering ditemukan juga bahwa ada nama penerima bantuan yang masih mendapatkan bantuan meskipun sudah tidak memenuhi kriteria, hal ini menyebabkan masih banyak kritikan dari masyarakat terkait kinerja Pemerintah Desa yang kurang maksimal dalam melakukan pendataan dan masih menggunakan data lama (PKH,2025) Dampak dari permasalahan data ini sangat signifikan terhadap kohesi sosial masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan salah paham jika tidak ditangani dengan baik (Menko PMK,2024) . Ketidakakuratan data tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik sosial di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Program Keluarga Harapan sebagai program bantuan sosial bersyarat memiliki regulasi khusus yang mengatur pelaksanaannya. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjadi payung hukum utama dalam implementasi PKH di seluruh Indonesia (Hukumonline,2018). Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan PKH, meliputi kriteria

penerima manfaat, besaran bantuan, mekanisme penyaluran, hingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan pada Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat yang mewajibkan penerima manfaat untuk memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, dengan penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun (Jogloabang,2021). Hal ini sejalan dengan tujuan PKH untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Keberadaan regulasi ini menjadi penting dalam konteks implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), karena sistem informasi tersebut harus mampu mengakomodasi kriteria penerima manfaat dan persyaratan yang ditetapkan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 untuk menjamin akurasi data penerima PKH. Implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Berdasarkan observasi awal dengan perangkat desa, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo. Pertama, masih banyak masyarakat yang tidak menerima ketika tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial meskipun merasa berhak menerimanya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi masyarakat tentang kriteria

penerima bantuan dengan data yang tercatat dalam sistem SIKS-NG. Menurut Chambers (2012), kesenjangan persepsi ini seringkali muncul karena kurangnya transparansi dalam penentuan kriteria penerima bantuan dan sosialisasi yang tidak optimal kepada masyarakat.

2. Kedua, implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo menghadapi kendala teknis berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2025. Selama periode observasi, teridentifikasi bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) mengalami kendala operasional yang berpengaruh terhadap pengelolaan data penerima bantuan sosial. Observasi menunjukkan bahwa kendala ini terkait dengan infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal, sehingga berpotensi menghambat proses pemutakhiran data dan akurasi penyaluran bantuan sosial. Selama periode ini, proses pemutakhiran data penerima bantuan terhambat, sehingga menyebabkan ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan merasa khawatir dan bingung, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status bantuan yang mereka harapkan. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa terabaikan dalam proses penyaluran bantuan sosial. Menurut pengamatan perangkat desa, banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar dalam sistem SIKS-NG, terutama selama periode penghentian operasi. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan dan keandalan sistem informasi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-

langkah perbaikan yang cepat dan efektif agar aplikasi SIKS-NG dapat beroperasi kembali dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Desa Tawangargo.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Padahal, menurut Lindblom (1979), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain kebijakan dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai implementasi SIKS-NG di Desa Tawangargo untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem tersebut dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial.

Dalam konteks akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks implementasi sistem informasi pada tingkat lokal. Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIKS-NG di tingkat desa, sehingga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Selain itu, dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIKS-NG dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial. Menurut World Bank (2018), peningkatan kualitas penargetan program bantuan sosial dapat menghemat

anggaran negara hingga 20% dan sekaligus meningkatkan dampak program terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial melalui implementasi SIKS-NG yang optimal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bagi penulis dan pembaca dapat mengetahui tujuan dari penelitian tentang Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial yakni sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial

2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bagi penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana efektifitas PKH pada aplikasi sistem SIKS-NG :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini memberikan referensi kepada mahasiswa tentang dinamika implementasi kebijakan digital dan pengaruh karakteristik lokal dalam sistem informasi pemerintahan desa.
- b) Dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menjadi tambahan berharga dalam literatur akademis terkait kebijakan publik melalui program digitalisasi SIKS-NG

2. Manfaat Praktis

- a) Peneliti ini dapat Menyediakan evaluasi komprehensif tentang efektivitas implementasi SIKS-NG di tingkat desa
- b) Bagi penulis dapat menambahkan pengetahuan kesadaran dan pemahaman tentang contoh aplikasi teori implementasi kebijakan dalam konteks nyata

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial next-Generation(SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Di Desa Tawangargo telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai upaya yang dilakukan, namun masih belum berjalan secara optimal di semua aspek. Dalam menilai implementasi kebijakan ini, digunakan pendekatan model George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek **komunikasi**, dalam penerapan program PKH melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, komunikasi antar tingkatan pemerintahan sudah berjalan dengan baik, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respon cepat. Operator telah membangun sistem komunikasi yang efektif melalui grup WhatsApp yang mencakup tingkat kabupaten hingga kecamatan, sehingga penyebaran informasi dapat berjalan dengan lancar. Namun, masih terdapat masalah serius dalam hal pelatihan dan pemberitahuan pembaruan sistem. Operator tidak pernah mendapat pelatihan formal sejak awal bertugas, sehingga harus belajar secara mandiri dengan bertanya kepada operator lain. Selain itu, sering terjadi keterlambatan

informasi mengenai perubahan atau pembaruan sistem, di mana operator baru mengetahui adanya perubahan setelah menemukannya sendiri, bukan dari pemberitahuan resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jalur komunikasi sudah tersedia, kualitas dan konsistensi informasi yang disampaikan masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas implementasi program. Dari indikator **Sumber daya**, dalam implementasi PKH melalui SIKS-NG menunjukkan kondisi yang bertentangan. Dari segi infrastruktur dasar, fasilitas pendukung sudah memadai dengan komputer yang bagus dan koneksi internet yang stabil. Kemampuan petugas juga cukup baik, di mana mereka sudah kompeten dalam menggunakan komputer dan aplikasi dasar seperti Excel dan Word. Sistem SIKS-NG juga berhasil menyediakan informasi yang lengkap dan terpadu untuk berbagai program bantuan sosial. Namun, terdapat masalah besar dalam hal stabilitas sistem dan ketersediaan tenaga kerja. Server SIKS-NG sering mengalami gangguan yang menghambat kelancaran operasional, sementara jumlah petugas terbatas sehingga operator sering kewalahan dengan beban kerja. Selain itu, tidak ada lagi sistem insentif untuk operator, padahal sebelumnya pernah ada. Masalah keakuratan data juga menjadi tantangan, di mana hanya sekitar 70% data yang akurat, sedangkan 30% masih kurang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dasar sudah memadai, masih diperlukan perbaikan dalam hal stabilitas sistem dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada indikator **disposisi**, Sikap para pelaksana dan penerima program PKH melalui SIKS-NG menunjukkan keberagaman yang dipengaruhi oleh faktor usia dan

kemampuan teknologi. Petugas menunjukkan sikap yang positif terhadap tujuan program karena menyadari bahwa SIKS-NG sangat membantu perekonomian masyarakat desa. Namun, mereka juga mengalami frustrasi dengan aspek teknis sistem yang dinilai agak rumit dan sering bermasalah. Generasi muda di kalangan penerima bantuan menunjukkan sikap yang sangat positif karena mereka terbiasa dengan teknologi digital dan menganggap sistem ini praktis dan mudah digunakan. Mereka juga aktif mencari informasi melalui berbagai media seperti WhatsApp, Instagram, dan website resmi. Sebaliknya, generasi yang lebih tua menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dan cenderung cemas terhadap teknologi karena tidak memahami sistem komputer, sehingga harus bergantung sepenuhnya pada bantuan petugas. Perbedaan sikap ini menciptakan tantangan dalam mencapai penerimaan yang menyeluruh, di mana diperlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap kelompok agar semua pihak dapat merasakan manfaat program secara optimal. Indikator terakhir adalah **struktur birokrasi**. Dalam implementasi PKH melalui SIKS-NG menghadapi masalah dalam hal standar operasional prosedur dan koordinasi antar instansi. Meskipun SOP untuk program PKH secara umum sudah tersedia di tingkat kebijakan, terdapat kesenjangan dalam sosialisasi dan implementasi di tingkat operasional. Operator tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai SOP khusus untuk pengoperasian SIKS-NG, sehingga harus bekerja berdasarkan pembelajaran mandiri yang berisiko menimbulkan ketidakseragaman. Pembagian tanggung jawab antara tingkatan sudah jelas, di mana operator hanya bertugas

mengajukan bantuan sedangkan keputusan persetujuan ada di tangan atasan. Namun, koordinasi lintas instansi menjadi rumit karena program PKH melibatkan sektor kesehatan dan pendidikan yang masing-masing memiliki sistem data dan prosedur berbeda. Selain itu, terdapat batasan waktu yang ketat untuk berbagai jenis pengajuan yang kadang sulit diingat oleh petugas dan dapat menghambat akses masyarakat terhadap program. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi memerlukan penyederhanaan prosedur dan peningkatan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

Secara keseluruhan, Implementasi Program Keluarga Harapan melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo menunjukkan hasil beragam. Komunikasi antar tingkatan sudah baik namun pelatihan operator masih kurang. Infrastruktur memadai tetapi server sering bermasalah dan tenaga kerja terbatas. Sikap petugas positif namun generasi tua kesulitan menggunakan teknologi. Struktur birokrasi jelas tetapi koordinasi lintas instansi rumit. Program sudah menunjukkan kemajuan digitalisasi namun perlu perbaikan stabilitas sistem, pelatihan petugas, dan pendekatan inklusif untuk efektivitas optimal.

2. Implementasi program PKH melalui SIKS-NG di Desa Tawangargo didukung oleh beberapa faktor kunci yang memungkinkan program berjalan dengan baik. Komunikasi antar instansi dari desa hingga kabupaten terjalin lancar dan responsif, terutama dalam situasi darurat. Kemudahan akses bantuan melalui sistem digital memungkinkan masyarakat melakukan

pendaftaran online, mengecek status di aplikasi, dan mengambil bantuan di ATM tanpa harus mengantri di kantor desa. Kualitas data dalam sistem cukup akurat karena masyarakat menginput sendiri dan rutin memperbarui informasi. Fasilitas pendukung seperti komputer dan internet sudah memadai setelah dilakukan perbaikan, serta perangkat desa memiliki kompetensi yang baik dalam mengoperasikan sistem digital.

Namun, implementasi juga menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas program. Masalah teknis berupa server yang sering error menjadi kendala utama karena dikelola terpusat sehingga operator tidak bisa memperbaiki sendiri. Kurangnya pelatihan formal memaksa operator belajar otodidak yang berisiko menimbulkan kesalahan. Ketidakakuratan data mencapai 30% menunjukkan masih ada kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Kurangnya sosialisasi tentang pembaruan sistem menyebabkan operator terlambat mengetahui perubahan fitur. Keterbatasan pemahaman teknologi terutama pada generasi tua membuat mereka bergantung pada bantuan petugas, serta proses input data terpusat tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial next-Generation (SIKS-NG) Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Di Desa Tawangargo

Implementasi Kecamatan Karangploso yaitu:

1. Ketidakakuratan data penerima bantuan, keterlambatan pemutakhiran data, dan kesulitan verifikasi persyaratan.

a) Sistem Validasi Data Berlapis dengan Pelibatan Komunitas

Membuat mekanisme pengecekan data secara bertingkat mulai dari RT/RW, tokoh masyarakat, desa, hingga kecamatan. Setiap tingkatan memverifikasi kebenaran data sebelum masuk ke sistem pusat. RT/RW dan tokoh agama diminta memberi konfirmasi apakah data di sistem sesuai dengan kondisi riil keluarga. Ini efektif karena orang lokal lebih tahu kondisi sebenarnya tetangga mereka dan bisa mengidentifikasi keluarga mana yang benar-benar berhak atau tidak berhak menerima bantuan.

b) Pemutakhiran Data Berbasis Kejadian dengan Aplikasi Mobile

Membuat sistem pelaporan otomatis setiap ada perubahan kondisi keluarga seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pindah kerja, atau naik kelas ekonomi. Mengembangkan aplikasi sederhana di HP yang bisa digunakan operator atau kader desa untuk melaporkan perubahan data langsung dari lapangan tanpa harus ke kantor desa. Setiap kejadian langsung dicatat dan dimasukkan ke SIKS-NG agar data selalu terkini, bukan menunggu jadwal pemutakhiran tahunan.

c) SOP Verifikasi yang Jelas dengan Bantuan Teknologi

Membuat jadwal tetap pemutakhiran data setiap 3-6 bulan sekali dengan reminder otomatis ke operator desa. Sistem juga memberi peringatan kalau ada data yang sudah lama tidak diupdate (lebih dari 6 bulan). Ini memastikan data diperbarui secara berkala, bukan hanya kalau ada keluhan dari masyarakat.

d) Pelatihan Verifikasi Lapangan untuk Operator

Mengadakan pelatihan praktik langsung ke lapangan bagi operator desa tentang cara memverifikasi kondisi ekonomi keluarga. Mereka diajarkan cara melihat indikator kemiskinan yang tidak hanya dari surat keterangan formal tapi dari observasi langsung kondisi keluarga di lapangan.

2. Aplikasi SIKS-NG mengalami kendala operasional yang berpengaruh terhadap pengelolaan data penerima bantuan sosial.

a) Perbaikan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi

Menyediakan perangkat komputer/laptop yang memadai dan koneksi internet stabil di setiap desa. Pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan dan pemeliharaan rutin perangkat IT di desa. Termasuk menyediakan genset atau backup power untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang sering terjadi di desa, sehingga operator bisa terus bekerja meskipun listrik mati.

b) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Berkala

Melakukan monitoring rutin terhadap kinerja sistem SIKS-NG: kecepatan loading, frekuensi error, tingkat kesulitan operator. Membuat mekanisme feedback dari operator desa tentang kendala yang mereka hadapi. Feedback ini digunakan untuk perbaikan sistem secara berkala sehingga aplikasi semakin baik dan sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.

c) Pelatihan Teknis Berkelanjutan dan Pendampingan

Mengadakan pelatihan rutin (minimal setiap 6 bulan) untuk operator desa tentang penggunaan SIKS-NG, cara mengatasi masalah teknis sederhana (troubleshooting), dan update fitur-fitur baru. Pelatihan tidak hanya teori di kelas tapi juga praktik langsung menggunakan aplikasi. Selain itu, menyediakan pendamping khusus di beberapa bulan awal implementasi yang bisa didatangi operator kalau ada kesulitan.

d) Sistem Backup Data Lokal dan Mode Offline

Membuat sistem backup data di level desa sehingga kalau SIKS-NG pusat bermasalah atau tidak bisa diakses (misalnya server down atau internet mati), data di desa tidak hilang dan pekerjaan bisa tetap berjalan dalam mode offline. Data lokal nanti disinkronkan secara otomatis kalau sistem pusat sudah normal kembali. Ini mencegah kehilangan data dan penundaan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sparrow, R., Suryahadi, A., & Widyanti, W. D. (2013). *Social Health Insurance for the Poor: Targeting and Impact of Indonesia's Askeskin Program*. *Social Science & Medicine*, 96, 264-271.
- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anderson, J. E. (2010). *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Arief, B. (2019). *Administrasi Publik di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2016).* *Panduan Praktis untuk Analisis Kebijakan: Delapan Langkah Menuju Pemecahan Masalah yang Lebih Efektif*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Bennett, C. J., & Howlett, M. (1992).* *Pelajaran dari Pembelajaran: Menyatukan Teori Pembelajaran Kebijakan dan Perubahan Kebijakan*. *Policy Sciences*, 25(3), 275-294.
- Creswell, J. W. (2014).* *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2015).* *Analisis Kebijakan Publik: Sebuah Pengantar*. New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Friedman, M. (2002).* *Peran Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial: Perspektif Perbandingan*. New York: Routledge.
- Gordon, L. (2010).* *Politik Kesejahteraan Sosial di Amerika Serikat*. New York: Routledge.
- Halim, M. (2020). *Manajemen Pemerintahan Berbasis Digital*. Bandung: Alfabeta.

- Halim. (2022). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, F. (2023). Kombinasi Pendekatan Digital Governance: Teori dan Praktik. Jakarta: Gramedia.
- Hidayat, T. (2020). Digital Governance: Revolusi Teknologi dalam Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2018).* Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Global. London: Routledge.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2005). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, R. A. (2021). Pendekatan Digital Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, M. (2019). E-Government dan E-Governance: Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, H. (2020). Strategi Implementasi E-Government. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2019). Komunikasi Publik dalam Kebijakan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi. Yogyakarta: Andi Offset
- Wahab, S. A. (2015). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, A. (2023). Inovasi Teknologi dan Tata Kelola Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, A. (2023). Pemerintahan Responsif di Era Digital. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wulandari, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Digital Governance. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Jurnal dan Skripsi:

- Raharjo, S., et al. (2023). Pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan dengan menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1). <https://infec.org/index.php/infec/article/view/206>
- Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. (2024). *Journal of Management and Social Development*. Retrieved from <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/download/317/258>
- Nadilla. (2022). Community Information Services Central Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Atas Overlapping Data Penerima Bantuan PKH Dan BLT. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/43098>
- Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ajaobaki*. Triwikrama: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Retrieved from

<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/download/3258/2796/9274>

- Andhika, L. R. (2017). "Meningkatkan Implementasi Kebijakan Melalui Model Kolaborasi". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 29-42.
- Anggara, S., Wisitaningrum, T., & Rahayu, A. Y. S. (2018). Analisis Kebijakan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 117-132.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559.
- Cahyadi, E., et al. (2020). Model Conditional Cash Transfer dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 45-60.
- Dharmawan, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45-60.
- Etzioni, A. (1967). "Mixed-scanning: A 'Third' Approach to Decision-making". *Public Administration Review*, 27(5), 385-392.
- Fadillah, R., & Purnamasari, I. (2023). Penerapan Teori Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pemerintah: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-62.
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2023). Evaluasi Penerapan SIKS-NG dalam Meningkatkan Efektivitas Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 78-92.
- Irawan, A. (2021). Implementasi SIKS-NG dalam Pengelolaan Data Penerima Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-60.
- Irawan, A. (2021). Keunggulan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation dalam Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-135

- Kurniawan, A., & Puspitasari, D. (2023). Faktor Kontekstual dalam Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat Lokal: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 110-128.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). "Implementation and Public Policy". Scott Foresman.
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 83-97.
- Nugraha, D. (2020). Pendekatan Keamanan dalam Digital Governance. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 6(2), 88-99.
- Nugraha, D. (2020). Pendekatan Keamanan dalam Digital Governance. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 6(2), 88-99.
- Nugroho, D. (2024). Tantangan Digitalisasi Data Kesejahteraan Sosial di Pedesaan: Studi Kasus Desa Tawangargo. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 45-60.
- Nugroho, R. (2020). Model Implementasi Kebijakan Publik: Antara Top-Down dan Bottom-Up. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 123-135.
- Paudel, N. R. (2009). "A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration". *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, 25(2), 36-54.
- Prasetyo, E., & Rohman, A. (2020). Kendala dalam Implementasi SIKS-NG di Daerah Pedesaan. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 6(2), 88-99.
- Pratikno. (2012). "Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 16(2), 77-91.
- Pratiwi, S. (2023). Analisis Infrastruktur Pendukung Implementasi SIKS-NG di Kabupaten Malang. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(3), 210-225.
- Purnamasari, I., & Sudarmo, S. (2019). Model Siklikal dalam Analisis Kebijakan Publik: Aplikasi dan Tantangannya dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 45-61.
- Putri, R. (2022). Analisis Tantangan Implementasi Digital Governance di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 23-35.

- Putri, S. R. (2021). Peran Digital Governance dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-58.
- Rahman, F. (2020). Tantangan Pelaksanaan Digital Governance di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 5(3), 89-101.
- Rahayu, S., & Pratama, B. (2021). Analisis kompetensi operator sistem informasi di pemerintahan desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur*, 9(1), 45-62.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sabatier, P. A. (1986). "Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis". *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.
- Santoso, H. (2022). Konsep Dasar Digital Governance: Tinjauan Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 112-126.
- Santoso, H. (2023). Peran Digital Governance dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 78-90.
- Saputra, Y. (2023). Adaptasi Pendekatan Digital Governance di Era Teknologi Cepat. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 53-65.
- Sari, N. A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Digital Governance: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 45-58.
- Sari, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Sosial dan Politik*, 10(3), 78-90.
- Sari, D. P., & Rahman, A. (2021). Implementasi SIKS-NG dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 125-140.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suryahadi, A., et al. (2021). Analisis Penargetan Program Keluarga Harapan di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial.
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2021). The impact of social assistance programs on poverty and welfare in Indonesia: The case of PKH. *The Journal of Development Studies*, 57(6), 980-996.
- Susanto, A., Widodo, H., & Hartini, S. (2023). Dampak Implementasi SIKS- NG Terhadap Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Tawangargo. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 115-130.
- Teisman, G. R. (2000). "Models for Research into Decision-Making Processes: On Phases, Streams and Decision-Making Rounds". *Public Administration*, 78(4), 937-956.
- Wahab, S. A. (2012). "Kebijakan Publik: Konsep, Dimensi dan Strategi". *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 78-92.
- World Bank. (2020). Targeting Social Assistance: A Review of the Evidence. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- Wulandari, E. (2024). Efektivitas SIKS-NG dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan: Studi di Desa Tawangargo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pembangunan*, 7(1), 28-43.

Website:

- BPS. (2024, 1 Juli). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen*. Siaran Pers No. 58/07/Th. XXVII. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- DRI IPB. (2019, 19 September). Guna percepatan graduasi mandiri, KPM PKH Sempur diserbu dosen IPB. *Direktorat Riset dan Inovasi IPB*. <https://dri.ipb.ac.id/guna-percepatan-graduasi-mandiri-kmp-PKH-sempur-diserbu-dosen-ipb/>
- Jakarta.go.id. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH). *Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Diakses dari <https://www.jakarta.go.id/program-keluarga-harapan-PKH>
- Kemensos. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH). *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/PKH>
- Repository UGM. (2019). *Pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap kemiskinan multidimensi di*

- Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/166945>
- Repository UGM. (2021). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Pulau Jawa: Analisis evaluasi dampak Propensity Score Matching (PSM) data IFLS 5. Universitas Gadjah Mada.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/174333>
- SMERU Research Institute. (2019). *Penguatan Peluang Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan: Studi Kasus di Empat Kabupaten di Jawa*. The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/publication-id/penguatan-peluang-ekonomi-keluarga-penerima-program-keluarga-harapan-studi-kasus-di>
- Universitas Airlangga. (2025, 11 Maret). Analisis determinan kemiskinan multidimensi di Indonesia. UNAIR News. <https://unair.ac.id/analisis-determinan-kemiskinan-multidimensi-di-indonesia/>
- World Bank. (2011). Program Keluarga Harapan: Main findings from the impact evaluation of Indonesia's pilot household conditional cash transfer program. World Bank.
- Aptika Ogan Ilir. (2024). SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Aptika Kabupaten Ogan Ilir.
<https://aptika.oganilirkab.go.id/aplikasi/SIKS-NG-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next-generation>
- Desa Piyaman. (2024). Pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG online. Pemerintah Desa Piyaman, Gunungkidul.
<https://desapiyaman.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1950-PENGLOLAAN-DTKS-MELALUI-APLIKASI-SIKS-NG-ONLINE>
- Kementerian PAN-RB. (2024). Inovasi SIKS-NG, sajikan data bansos terintegrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-SIKS-NG-sajikan-data-bansos-terintegrasi>
- Portal Satu Data Indonesia. (2022). *Data Indeks Desa Membangun 2022*. Retrieved from <https://katalog.satudata.go.id/dataset/data-indeks-desa-membangun-2022>
- Bimardhika, E. (2023). *The Perils of Minimizing Leakage in Social Protection Targeting*. Medium. Retrieved from <https://medium.com/@elghafiky/the-perils-of-minimizing-leakage-in-social-protection-targeting-8ee91f30028c>
- MicroSave. (2024). *Deepening Financial Inclusion through Cash Transfers: The Case of PKH in Indonesia*. Retrieved from <https://www.microsave.net/2019/11/13/deepening-financial-inclusion-through-cash-transfers-the-case-of-PKH-in-indonesia/>
- Masterplandes. (2022). *Transformasi Desa Digital: Potensi Luar Biasa, Tantangan Beragam*. Retrieved from <https://www.masterplandes.com/desa-digital/transformasi-desa-digital-potensi-luar-biasa-tantangan-beragam/>

- DigitalDesa.id. (2024). *Transformasi Digital Desa dengan Infrastruktur Internet dan Teknologi Modern*. Retrieved from <https://digitaldesa.id/artikel/transformasi-digital-desa-dengan-infrastruktur-internet-dan-teknologi-modern>
- Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. (2024). *Pelatihan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)*. Retrieved from <https://dinsos.ngawikab.go.id/2023/02/22/pelatihan-teknis-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next-generation-SIKS-NG/>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Menko PMK berdialog dengan Masyarakat Desa Tawangargo*. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-berdialog-dengan-masyarakat-des-tawangargo>
- Kompas. (2023, 20 Februari). Daerah tertinggal di Indonesia masih sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Kompas.com. <https://www.kompas.com/nasional/read/2023/02/20/daerah-tertinggal-indonesia-kemiskinan>
- “Tawangargo, Karangploso, Malang.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 1 May 2025, id.wikipedia.org/wiki/Tawangargo,_Karangploso,_Malang. Accessed 01 May 2025
- Syafnidawaty. “DATA PRIMER.” UR, 8 Nov. 2020, raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/. Accessed 01 May 2025.

Undang-undang:

- Kementerian Sosial RI. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Kementerian Sosial RI. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Studi Dampak Pendampingan Sosial terhadap Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat PKH*. Jakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Laporan Tahunan Implementasi SIKS-NG*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Pedoman Implementasi SIKS - NG*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Pedoman Implementasi SIKS - NG*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.